

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Hanya RSUD Cililin Berstatus BLUD

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung Barat

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 7

Edisi : Kamis, 29 November 2018

Hanya RSUD Cililin Berstatus BLUD

NGAMPRAH, (GM).-

Baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sementara dua rumah sakit milik Pemkab Bandung Barat lainnya, yaitu RSUD Lembang dan RSUD Cikalongwetan masih dalam proses menjadi BLUD.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Hernawan Widjajanto di Ngamprah, Rabu (28/11). RSUD Cililin sudah menjadi BLUD sejak tahun 2016.

Menurutnya, pembentukan BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan mengelola keuangan secara mandiri, maka pelayanan kesehatan bisa lebih cepat.

"Pengelolaan keuangan di BLUD lebih fleksibel. Uang yang masuk hari ini bisa langsung dimanfaatkan untuk percepatan pelayanan. Kalau tidak BLUD, kan harus pengajuan dulu sehingga membutuhkan waktu, sementara di sisi lain layanan kesehatan harus cepat," kata Hernawan.

Dijelaskannya, proses pengelolaan keuangan yang dijalankan pada RSUD saat ini memerlukan mekanisme yang panjang. Soalnya, dengan status unit pelaksana teknis di Dinas Kesehatan maka kebutuhan RSUD memerlukan proses pengajuan dan pencairan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

"Kalau BLUD, mekanisme pengelolaan keuangannya itu tidak melalui Dinkes dan BPKD. Bagaimana pun, mekanisme seperti itu kan berpengaruh terhadap pelayanan. Makanya, unit pelayanan publik yang perlu percepatan pelayanan, ketika ada uang berputar, sebetulnya pengelolaan keuangannya harus BLUD," tuturnya.

Meski, pendapatan RSUD Cililin tak perlu disetorkan ke kas daerah, bukan berarti tidak memberikan laporan ke Pemkab Bandung Barat.

"Pelaporan tetap harus ada, karena bagaimana pun RSUD Cililin itu bagian dari Pemkab Bandung Barat," tandasnya.

Suntikan dana

Kendati sudah berstatus BLUD,



Hernawan Widjajanto

RSUD Cililin masih mendapat suntikan dana dari APBD KBB sebesar Rp 10 miliar per tahun. Lain halnya dengan RSUD Lembang dan RSUD Cikalongwetan mendapat kucuran dana belasan miliar per tahunnya.

"Pemkab Bandung Barat tidak melepas begitu saja. Kalau sudah benar-benar bisa memenuhi keuangannya sendiri, tidak perlu lagi mendapat suntikan anggaran," tandasnya.

Terkait dengan RSUD Lembang dan Cikalongwetan, Hernawan menjelaskan, sedang berproses menjadi BLUD. Pasalnya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan data yang dimiliki "GM", pembentukan BLUD pada RSUD Lembang relatif lebih rumit, karena RSUD Lembang berasal dari puskesmas yang dikembangkan. Kondisi tersebut berbeda dengan RSUD Cililin, yang memang dibangun untuk menjadi RSUD pada 2012. Pun demikian dengan RSUD Cikalongwetan, dibangun langsung rumah sakit.

Sementara itu, salah satu keuntungan RSUD yang sudah berstatus BLUD antara lain, tata kelola keuangan RSUD lebih baik dan transparan karena menggunakan pelaporan standar akuntansi keuangan yang memberi informasi tentang laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. **(B.104)****